

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penyertaan data referensi menjadi penting, yang terdiri dari konsep dan temuan yang telah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain. Penulis menekankan pentingnya data referensi ini, yang akan disajikan sebagai bagian yang berbeda dalam penelitian ini di bawah judul "Penelitian Terdahulu." Dalam sub-bab ini, berbagai isu yang terkait dengan fenomena yang diteliti akan dieksplorasi, bersama dengan implementasi diplomasi pertahanan yang relevan untuk mengatasi ancaman konflik. Fokus utama dari bagian Penelitian Terdahulu adalah untuk membangun hubungan antara penerapan diplomasi pertahanan dan tantangan yang terkait dengan kerja sama pertahanan dalam menghadapi ancaman konflik.

Untuk memastikan kekuatan data referensi, bagian Penelitian Terdahulu akan mengambil dari berbagai sumber penelitian, termasuk jurnal dan artikel terkait yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber ini, penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas :

Adapun studi terdahulu yang pertama ditulis oleh *Reysky Vinsent Ramazotty* dalam jurnal yang berjudul *Hubungan Jepang Dan Amerika Serikat Di Bidang Pertahanan Periode 2006-2014* yang dipublikasi oleh Eprints Repository pada tahun 2016. Pada intinya, jurnal ini mengkaji Hubungan Internasional antara

Jepang dan Amerika Serikat selama periode 2006 hingga 2014, secara khusus menyoroti upaya kerja sama Jepang dalam menjaga kedaulatannya dari ancaman yang berasal dari negara tetangga. Melalui kerja sama internasional, Jepang berusaha untuk mengatasi keterbatasannya dalam mengimbangi atau meningkatkan kemampuan pertahanannya, sehingga menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Timur. Penulis mengadopsi pendekatan keamanan internasional Buzan, yang mengkategorikan keamanan ke dalam lima dimensi: politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap dimensi mencakup unit keamanan yang berbeda, nilai-nilai, karakteristik kelangsungan hidup, dan ancaman. Dalam penelitian ini, fokusnya terletak pada aspek ancaman keamanan yang dihadapi oleh Jepang, terutama yang berasal dari pengembangan program nuklir Korea Utara yang sedang berlangsung, serta perselisihan teritorial dengan Tiongkok dan Rusia. Ancaman-ancaman ini mewakili kekhawatiran utama Jepang dalam menjaga kedaulatan teritorialnya dan memitigasi potensi bahaya terhadap keamanannya di semua aspek.

Studi ini menggambarkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait masalah keamanan dan pertahanan untuk melindungi warganya. Tujuan utama dan faktor pemandu bagi negara, yang diwakili oleh para pengambil keputusan, adalah mengejar kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara mencakup elemen-elemen penting, seperti pertahanan, keamanan, aspek militer, dan kesejahteraan ekonomi, yang merupakan persyaratan paling krusial.

Dalam penelitian ini, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dapat mencapai dan mempertahankan kepentingannya di kawasan Asia Timur, dengan fokus khusus pada Jepang. Kepentingan nasional Amerika Serikat mencakup tujuan politik dan ekonomi terkait negara-negara di Asia Timur dan mengeksplorasi metode untuk melindungi dan menegakkan kepentingan tersebut.

Relevansi artikel jurnal diatas dengan penelitian ini adalah pembahasan dalam artikel ini terdapat dalam aspek keamanan, yaitu ancaman pengembangan nuklir korea utara. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian ini adalah fokus waktu pembahasan, dan juga dalam penggunaan teori.

Studi terdahulu yang kedua ditulis oleh Ida Bagus Gandhi Maheswara, Suksma Susanti, dan Idin Fasisaka dengan judul *Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS* yang dipublikasi oleh Jurnal Hubungan Internasional pada tahun 2020. Jurnal ini mengkaji tentang modernisasi militer Cina yang memaksa Jepang untuk menguatkan militernya dengan bantuan oleh Amerika. Kemudian selanjutnya adalah kompleksnya permasalahan di kawasan Asia Timur yang melibatkan negara-negara besar yang saling memperkuat militernya untuk menjaga teritorinya.

Tindakan Tiongkok dalam upaya mengubah keadaan yang ada secara sepihak melibatkan penggunaan paksaan, pengabaian hukum internasional, dan pelanggaran kebebasan bernavigasi. Hal ini terbukti dalam sengketa yang sedang

berlangsung antara Jepang dan Tiongkok. Pemerintah Jepang, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abe, memandang perilaku Tiongkok secara keseluruhan sebagai masalah yang mengkhawatirkan tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi masyarakat internasional.

Di tengah situasi yang semakin tidak stabil di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat dan Jepang memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini melalui kerja sama. Namun, ada perbedaan di antara mereka terkait kekhawatiran khusus Jepang mengenai sengketa Kepulauan Senkaku (Diaoyu) dengan Cina di Laut Cina Timur.

Relevansi artikel jurnal diatas dengan penelitian ini adalah pembahasan artikel ini memiliki kesamaan yaitu penguatan militer Jepang dengan bantuan oleh Amerika Serikat. Perbedaan artikel diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus atau alasan Jepang menguatkan militernya, dalam jurnal hal itu terjadi karena adanya modernisasi militer dari China dan juga sengketa kepulauan Senkaku antara Jepang dan China.

Studi terdahulu yang ketiga di tulis oleh Ellie Listiana dan Erna Kurniawati dengan judul jurnal *Perpanjangan Aliansi Jepang-Amerika Serikat pada tahun 2013 (Perspektif Jepang)* yang dupublikasi oleh Semantic Scholar pada tahun 2014. Struktur jurnal ini mengeksplorasi dampak dari dinamika keamanan yang berkembang di Asia Timur terhadap aliansi yang muncul antara Jepang dan Amerika Serikat. Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, Jepang telah

mengintensifkan kerja samanya dengan Amerika Serikat, menjalin kemitraan keamanan yang erat dan tak terpisahkan.

Selain itu, jurnal ini menggali keterlibatan proaktif Jepang dalam upaya perdamaian dan keamanan internasional, yang menunjukkan prinsip-prinsip dan dedikasi negara untuk mempromosikan perdamaian. Kebijakan Jepang mencerminkan komitmen yang kuat untuk mencapai perdamaian bagi semua orang dan bekerja sama dengan komunitas global untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Komitmen ini terlihat jelas dalam Konstitusi Jepang tahun 1947, yang secara eksplisit menguraikan dedikasinya terhadap perdamaian internasional dalam Pasal 9. Pasal tersebut menegaskan tekad Jepang untuk meninggalkan agresi, ancaman, dan penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik internasional, yang menunjukkan komitmennya untuk membina iklim perdamaian dan kerja sama internasional.

Relevansi artikel jurnal diatas dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai penguatan militer Jepang dan juga acaman Nuklir korea Utara akan tetapi memiliki perbedaan dalam fokus waktu pembahasan dan juga teori yang digunakan dalam menjelaskan fenomena ini.

Studi terdahulu yang keempat ditulis oleh *Meidy Amanda* dengan judul “*Dilema Aliansi Amerika Serikat Terkait Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang*” dipublikasi oleh Paradigma Polistaat pada tahun 2018. Makalah ini menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat dapat mengindikasikan kecenderungan untuk menyimpang dari kewajiban aliansinya dengan Jepang.

Terlepas dari upaya untuk meningkatkan kerja sama militer, komitmen Amerika Serikat untuk menjadi "payung" pelindung bagi Jepang tampaknya mulai memudar. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan kekhawatiran Amerika Serikat tentang keterlibatannya dalam konflik yang melibatkan Jepang dan musuh-musuhnya, terutama Cina dan Korea Utara. Meningkatnya potensi konflik semacam itu telah membuat Amerika Serikat mencari cara untuk mengurangi tingkat keterlibatannya.

Untuk mengurangi risiko jebakan dan mengurangi beban Amerika Serikat, ada penekanan yang semakin besar pada peningkatan kemampuan militer Jepang. Dengan demikian, Jepang dapat memikul lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanannya, sehingga aliansi ini lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat, karena meminimalkan potensi keterlibatan yang tidak diinginkan dalam konflik.

Relevansi dengan penelitian ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi pada Jepang dan bantuan Amerika dalam penguatan militer Jepang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dan juga fokus pada artikel jurnal di atas adalah kepentingan Amerika dalam melakukan penaguatan militer Jepang.

Penelitian terdahulu yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh *Agustinus Tri Darma Kusuma, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen* dengan judul “*Aliansi Amerika Serikat dengan Jepang dalam Kebijakan Rebalancing di Kawasan Asia Pasifik 2011-2016*” yang dipublikasi oleh Udayana Networking pada tahun 2018. Garis besar jurnal ini mencakup pemeriksaan kebijakan penyeimbangan kembali Amerika Serikat sebagai pendekatan strategis jangka panjang untuk mengejar kepentingannya di kawasan Asia Pasifik. Inti dari

kebijakan ini adalah memperkuat hubungan dengan negara-negara sekutunya di kawasan ini. Pada saat yang sama, Amerika Serikat harus bergulat dengan kebangkitan Cina, yang dianggap sebagai ancaman potensial terhadap dominasinya di kawasan ini. Tujuan utama dari kebijakan penyeimbangan kembali ini bukanlah untuk mengepung Cina, melainkan untuk memoderasi atau membatasi peran dan pengaruhnya di kawasan ini. Perspektif ini terlihat jelas dalam tindakan yang diambil oleh pemerintahan Obama, yang cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan Cina.

Relevansi dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai penguatan pertahanan Jepang akan tetapi memiliki perbedaan dalam fokus waktu dan juga artikel jurnal diatas lebih menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dalam melakukan Kebijakan Rebalancing di kawasan Asia Pasifik.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Teori Diplomasi**

Dalam bukunya yang berjudul "The Principle of Diplomacy," KM Panikkar menjelaskan bahwa diplomasi dalam politik internasional merupakan seni untuk mewujudkan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, yang mencakup kepentingan nasional di dunia internasional. Beberapa pandangan mengenai diplomasi lebih menekankan pada negosiasi perjanjian atau tawar-menawar dengan negara lain.

Diplomasi erat kaitannya dengan mencari penyelesaian damai atas berbagai permasalahan, namun jika upaya damai tidak berhasil mencapai tujuan yang

diinginkan, diplomasi memungkinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perang juga dapat dianggap sebagai salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional.<sup>6</sup>

Setiap negara memiliki tujuan diplomasi yang meliputi pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik, dan integritas wilayah. Menurut Kautilya, tujuan utama diplomasi adalah memastikan keuntungan maksimum bagi negara itu sendiri, dengan pemeliharaan keamanan sebagai prioritas utama. Diplomasi berfungsi terutama dalam melakukan negosiasi, dengan tujuan menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjaga kepentingan negara melalui kesepakatan yang berhasil. Namun, jika negosiasi gagal, perang menjadi bagian dari opsi dalam rangka mencapai tujuan diplomasi. Selain itu, terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara, yaitu kerjasama, persuasi, dan pertentangan. Oleh karena itu, dalam proses diplomasi suatu negara, kemungkinan akan menjalankan ketiga cara tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi yang dilakukan.

Fungsi utama dari diplomasi adalah melakukan negosiasi dan mencakup upaya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memastikan kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang berhasil. Jika negosiasi tidak berhasil, perang dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi. Selain itu, ada tiga cara dasar yang digunakan dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara, yaitu kerjasama,

---

<sup>6</sup> S.L. Roy, "Diplomasi", (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal. 21

persuasi, dan pertentangan. Dalam proses diplomasi, suatu negara kemungkinan akan menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

Suatu negara yang ingin mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang bijaksana dan damai harus terus membandingkan tujuan-tujuannya dengan tujuan negara-negara lain berdasarkan kesesuaian tujuan tersebut. Apabila tujuan-tujuan tersebut tidak cocok, maka negara A akan menetapkan bahwa tujuannya adalah penting bagi kepentingan nasionalnya sendiri, sehingga tujuan-tujuan tersebut harus dicapai meskipun tidak sesuai dengan tujuan negara B. Namun, jika negara A menemukan bahwa tujuan-tujuannya sangat penting untuk kepentingan nasionalnya, negara A akan mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan negara B yang tidak sesuai dengan tujuannya. Setelah itu, dilakukan kesesuaian tujuan di antara kedua negara tersebut.<sup>7</sup>

Menurut teori di atas, ketika sebuah negara menghadapi kebijakan dari negara lain, pengambilan langkah diplomasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan internasional dan diplomatik. Di lingkungan internasional, setiap negara dituntut untuk berupaya memperjuangkan kepentingannya sendiri, sehingga wajar jika sebuah negara mengubah pola diplomasi terhadap negara lain atau lingkungan eksternal demi melindungi wilayah teritorialnya dari ancaman negara lain. Faktor lingkungan diplomatik juga memiliki pengaruh besar terhadap diplomasi negara.

---

<sup>7</sup> Ibid

Ini terjadi karena terkadang ada benturan kepentingan antara negara-negara, yang menyebabkan munculnya diplomasi perlawanan antara mereka.<sup>8</sup>

### 2.2.2 Konsep Diplomasi Pertahanan

Dalam ranah politik internasional, diplomasi mencakup pengejaran kepentingan suatu negara dengan memprioritaskan negosiasi damai dan kerja sama dengan negara lain. Namun, jika pendekatan damai terbukti tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, diplomasi juga memungkinkan untuk mempertimbangkan penggunaan ancaman atau bahkan penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

Dalam karya Morgenthau, "Politics Among Nations," ia menyoroti tiga metode diplomasi yang sangat penting: persuasi, kerja sama (melalui kompromi), dan penggunaan kekuatan sebagai ancaman potensial. Negara-negara menggunakan salah satu atau kombinasi dari prinsip-prinsip diplomasi utama ini untuk mencapai tujuan mereka dalam hubungan internasional. Prinsip-prinsip ini mencakup sama (negosiasi damai atau mediasi), dana (menawarkan hadiah atau konsesi), denda (memicu perselisihan atau perselisihan), dan bedha (menggunakan ancaman atau kekuatan yang sebenarnya).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Diplomacy dan Power

[https://www.researchgate.net/publication/340225425\\_Journal\\_of\\_Diplomacy\\_and\\_International\\_Studies\\_DIPLOMASI\\_DAN\\_POWER\\_SEBUAH\\_KAJIAN\\_ANALISIS/link/5e7db751299bf1a91b7f17aa/download](https://www.researchgate.net/publication/340225425_Journal_of_Diplomacy_and_International_Studies_DIPLOMASI_DAN_POWER_SEBUAH_KAJIAN_ANALISIS/link/5e7db751299bf1a91b7f17aa/download)

<sup>9</sup> S.L. Roy, "Diplomasi", (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal. 3.

<sup>10</sup> Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948, dan edisi selanjutnya) New York NY: Alfred A. Knopf.

Namun, karena sistem internasional bersifat anarki, serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, negara harus meningkatkan kemampuan pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman dan serangan.

Gregory Winger mencirikan diplomasi pertahanan sebagai bentuk kekuatan lunak yang digunakan oleh suatu negara, di mana lembaga-lembaga pertahanannya menggunakan cara-cara damai untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Pendekatan ini mengambil bentuk model langsung, di mana pemerintah suatu negara secara langsung berinteraksi dengan pemerintah lain untuk mencapai tujuan yang berkisar pada mempromosikan perdamaian dan membina hubungan kerja sama yang selaras dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Modus keterlibatan ini mencakup *Officer Exchange, Military Exercise, Training Mission, Military Diplomats*, dan *Ship Visits*.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum menjelaskan fenomena kerjasama antara Jepang dan Amerika menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan ini. Kemudian penerapan konsep ini adalah untuk menjelaskan berbagai rangkaian bentuk-bentuk kerja sama baik dari berbagai pertemuan diplomatik, pertukaran perwira, latihan berbasis misi, dan kunjungan kapal militer di bidang pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat.

---

<sup>11</sup> Gregory Winger, "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy", Vol. 33, diakses dari: <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/>

### 2.2.3 Konsep Nuclear Deterrence

Pada tahun 1945, komunitas global dikejutkan oleh munculnya sebuah alat perang yang memiliki daya kekuatan yang luar biasa, yaitu senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan hasil dari kemajuan teknologi militer dengan menghadirkan alat perang yang memiliki kekuatan sangat besar. Dengan hanya sedikit jumlahnya, senjata nuklir memiliki kapabilitas untuk menghancurkan sebuah kota melalui ledakan dan radiasi yang dihasilkannya. Hal ini dengan jelas terlihat pada penggunaan pertama dan satu-satunya senjata nuklir oleh Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, Amerika Serikat menggunakan bom atom untuk melumpuhkan Jepang dengan menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selain kemampuan ledakan yang dapat menyebabkan banyak kematian manusia, efek radiasi yang dilepaskan dalam jangka panjang memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang terkena dampak. Karena alasan tersebut, penggunaan tenaga nuklir sebagai senjata dianggap sebagai tindakan yang sangat berisiko.<sup>12</sup>

Para pemikir dalam bidang politik internasional, terutama yang memfokuskan pada aspek keamanan global, memiliki dua pandangan yang berbeda. Sudut pandang pertama dapat dianggap sebagai pandangan yang mendukung penyebaran nuklir. Menurut pandangan ini, keberadaan senjata nuklir

---

<sup>12</sup> The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: A Summary of the Human Consequences, 1945-2018, and Lessons for *Homo sapiens* to End the Nuclear Weapon Age diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2019.1681226>

justru dianggap mampu membawa stabilitas dan perdamaian ke dunia. Tetapi, hal ini dianggap wajar hanya jika negara-negara di seluruh dunia diberikan kebebasan untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir sendiri.

Tidak sama dengan sudut pandang awal yang mendorong perluasan nuklir, pandangan kedua yang diajukan oleh beberapa ahli berbeda. Pendekatan kedua ini berpendapat bahwa kepemilikan senjata nuklir di seluruh dunia perlu diatur secara ketat untuk menjaga stabilitas keamanan global. Argumen ini timbul dari kekhawatiran bahwa jika semua negara diperbolehkan memiliki senjata nuklir, maka hal tersebut berpotensi memicu perlombaan senjata dan bahkan ancaman perang nuklir. Dari pandangan ini muncul rezim nonproliferasi nuklir, yang menghasilkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).<sup>13</sup>

Secara umum, pengertian deterrence adalah bagaimana membuat musuh takut untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan kepada negara yang memiliki kapabilitas yang kuat. Tetapi bagaimana bila sebuah negara tidak memiliki kapabilitas yang kuat untuk melakukan deterrence? Jawabannya bisa ditemukan lewat penangkalan nuklir (nuclear deterrence).

Seperti yang dikemukakan Waltz dalam Art dan Jervis tahun 2000, negara kuat akan berpikir panjang dan cenderung ragu-ragu untuk menyerang negara lemah tapi memiliki nuklir. Memang jika negara memiliki nuklir, bahkan dari

---

<sup>13</sup> Erik Gartzke dan Dong-Joon Jo , Bargaining, Nuclear Proliferation, and Interstate Disputes. Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002708330289>

fasilitasnya saja, akan dianggap sebagai negara yang mengganggu resiko yang kecil akan diserang negara lain. Resiko ini akan semakin berkurang jika pemerintahan yang memiliki nuklir secara kuat termotivasi untuk menjaga negaranya. Negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung resiko yang besar jika meremehkan nuclear deterrence. Keamanan nasional didapatkan bila negara mampu melindungi masyarakatnya dengan meminimalisir ancaman keamanan yang mungkin muncul. Cara penanganan penghilangan ancaman bisa dilakukan dengan menggunakan cara penangkalan (deterrence).

Waltz menyatakan bahwa ketakutan senjata nuklir akan dipergunakan dalam perang karena gagalnya deterrence merupakan suatu kesalahan. Menurut Waltz, kegagalan deterrence yang akan mengakibatkan peperangan memang dimungkinkan, namun hanya pada persenjataan konvensional. Deterrence yang ditimbulkan dari senjata nuklir menurut Waltz tidak akan berujung pada kegagalan. Negara-negara pemilik senjata nuklir hanya perlu menunjukkan sedikit kesungguhannya melakukan serangan balasan atau retaliations atau second strike untuk menimbulkan rasa gentar pada negara musuh dan mencegah terjadinya serangan. Waltz memberi contoh bahkan dengan keunggulan kemampuan nuklir yang dimiliki Amerika Serikat dibanding Uni Soviet, keduanya tidak pernah terlibat perang. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memahami bahwa serangan pertama yang mereka luncurkan tidak menjamin akan cukup untuk melumpuhkan Uni Soviet dan akan berhadapan dengan serangan nuklir balasan.

Penulis menggunakan konsep *nuclear deterrence* dikarenakan untuk mengetahui tujuan dari agresivitas yang dilakukan Korea Utara dalam

pengembangan senjata nuklirnya. Korea Utara melakukan berbagai rangkaian uji coba rudal balistik berbasis nuklir dari tahun ketahun, dengan menggunakan konsep ini diharapkan penulis bisa menjelaskan alasan Korea Utara melakukan hal tersebut.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Perkembangan sejarah persaingan antara negara-negara besar di dunia memiliki kaitan erat dengan persaingan untuk menguasai wilayah laut. Faktor ini berkaitan dengan pentingnya wilayah laut sebagai aspek penting untuk mengamankan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, membentuk jalur perdagangan, dan menjaga keamanan wilayah daratan. Seiring dengan munculnya berbagai gangguan dan ancaman di wilayah laut, banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan keamanan di wilayah laut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara maupun masyarakat internasional.

Jepang dan Amerika Serikat telah mempertahankan aliansi yang telah berlangsung lama, yang dimulai setelah Perang Dunia II dan terus berlanjut hingga hari ini. Aliansi ini awalnya terjalin sebagai respons terhadap perilaku agresif Korea Utara dalam konflik di Semenanjung Korea, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap negara-negara tetangga, termasuk Jepang. Adanya ancaman bersama ini berpotensi berdampak pada stabilitas hubungan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat.<sup>14</sup> Sebaliknya, Jepang menegaskan sikapnya dalam pernyataan resmi yang

<sup>14</sup> Krisandhy Ertanto Rantung “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama” diakses pada tanggal 12 Juli 2023 melalui [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/746/jbptunikompp-gdl-krisandhye-37272-1-unikom\\_4-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/746/jbptunikompp-gdl-krisandhye-37272-1-unikom_4-1.pdf)

dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2016, yang menekankan bahwa kepemilikan dan uji coba senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman langsung tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik. Oleh karena itu, Jepang dan Amerika Serikat saling bergantung dalam menjaga hubungan aliansi mereka untuk mengatasi ancaman yang ada secara efektif.<sup>15</sup>



<sup>15</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, “*Measures Taken by the Government of Japan against North Korea*”, diakses dari: [https://www.mofa.go.jp/a\\_o/na/kp/page3e\\_000628.html](https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page3e_000628.html)